



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI V DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
(16 AGUSTUS SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2023)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 5 Juli 2023 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2023, berjumlah 32 (tiga puluh dua) hari kerja atau 48 (empat puluh delapan) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 4 sampai dengan 30 Oktober 2023, berjumlah 20 (dua puluh) hari kerja atau 28 (dua puluh delapan) hari kalender.

Kegiatan Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 difokuskan pada kegiatan Anggaran dan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di komisi dan melakukan kunjungan kerja spesifik serta kunjungan kerja reses Masa Persidangan I tahun Sidang 2023-2024 untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI LEGISLASI

Berdasarkan Surat dari Pimpinan Badan Legislasi tanggal 21 Agustus 2023 perihal Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024, Komisi V DPR RI telah melakukan rapat dengan BKD mengenai Masukan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024, tanggal 23 Agustus dan 11 September 2023. Dari hasil rapat tersebut, maka Komisi V DPR RI menyampaikan kepada Pimpinan Badan Legislasi usulan RUU Prioritas Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Perubahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Perubahan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Perubahan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

FUNGSI ANGGARAN

Dalam fungsi Anggaran Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI berdasarkan jadwal pembahasan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2022 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024.

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan Komisi V DPR RI telah melakukan RDPU dan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi, Rapat Kerja dan RDP dengan mitra kerja Komisi V DPR RI, serta melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN :

Rapat Pimpinan Komisi V DPR RI, Selasa, 22 Agustus 2023 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan I Tahun 2023 – 2024 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan I Tahun 2023 – 2024 mulai tanggal 16 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2023.

BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Selasa, 29 Agustus 2023, agenda Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2022 dan RKA K/L TA. 2024 Kementerian Desa PDTT dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2024, memutuskan :
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
 - b. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap alokasi anggaran Kementerian dalam RAPBN TA 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPN/D.8/ PP.04.02/ 07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024 sebagai berikut:

Dalam

Ribu Rupiah

KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
	A	B	(A-B)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4.744.518.054	2.757.268.382	1.987.249.672

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

- c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar:
 - 1) menyesuaikan alokasi pagu anggaran TA 2024 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI;
 - 2) menambah alokasi anggaran untuk bantuan pengembangan BUMDes dan Desa Wisata;
 - 3) berperan aktif pada Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 memberi ruang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.
2. Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Rabu, 30 Agustus 2023, agenda membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2022 dan RKA K/L TA. 2024 Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2024, memutuskan :
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
 - b. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Menteri Perhubungan terhadap alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dalam RAPBN TA 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPN/D.8/ PP.04.02/ 07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024 sebagai berikut:

Dalam

Ribu Rupiah

KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
	A	B	(A-B)
Kementerian Perhubungan	74.536.458.54 3	38.477.079.886	36.059.378.65 7

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

- c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk:

- 1) menyesuaikan alokasi pagu anggaran TA 2024 berdasarkan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI;
 - 2) menuntaskan program/kegiatan *multiyears* sampai TA 2024;
 - 3) memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan bandara, pelabuhan, serta terminal;
 - 4) meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.
3. Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, Rabu, 30 Agustus 2023, agenda Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2022, dan RKA K/L TA. 2024 Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2024, memutuskan :
- a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
 - b. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Menteri PUPR terhadap alokasi anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN TA 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPN/D.8/ PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024 sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah

KEMENTERIAN	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
	A	B	(A-B)
Kementerian PUPR	190.743.036.29 8	146.987.447.201	43.755.589.09 7

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

- c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran TA 2024 berdasarkan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI, serta disesuaikan dengan hasil pembahasan alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 pada Rapat Dengar Pendapat mendatang.
- d. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk menambah alokasi anggaran pada program Padat Karya Tunai TA 2024, minimal sama dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.

4. Rapat Kerja dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Kamis, 7 September 2023, agenda Penetapan hasil pembahasan RKA K/L TA. 2024 Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :

a. Komisi V DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran masing-masing Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG; dan BNPP/Basarnas sesuai dengan Nota Keuangan RAPBN TA 2024 sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A - B
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	190.743.036.298	146.987.447.201	43.755.589.097
a.	Sekretariat Jenderal	584.007.802	578.736.341	5.271.461
b.	Inspektorat Jenderal	136.400.000	91.232.000	45.168.000
c.	Ditjen Bina Marga	77.722.959.795	55.399.768.580	22.323.191.215
d.	Ditjen Cipta Karya	32.455.360.000	32.704.222.429	(248.862.429)
e.	Ditjen Sumber Daya Air	52.930.280.409	47.644.049.911	5.286.230.498
f.	Ditjen Perumahan	25.172.229.142	9.251.957.240	15.920.271.902
g.	Ditjen Bina Konstruksi	692.054.956	590.514.956	101.540.000
h.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	231.777.669	142.328.583	89.449.086
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	611.890.525	425.138.972	186.751.553
j.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	206.076.000	159.498.189	46.577.811
2.	Kementerian Perhubungan	74.536.458.543	38.477.079.886	36.059.378.657
a.	Sekretariat Jenderal	1.243.503.124	645.574.148	597.928.976
b.	Inspektorat Jenderal	141.193.093	111.108.529	30.084.564
c.	Ditjen Perhubungan Darat	13.716.423.09	6.642.204.664	7.074.218.430

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A - B
		4		
d.	Ditjen Perhubungan Laut	14.775.940.19 7	9.499.464.798	5.276.475.399
e.	Ditjen Perhubungan Udara	19.591.350.77 5	7.673.375.788	11.917.974.98 7
f.	Ditjen Perkeretaapian	15.039.689.31 6	9.689.137.480	5.350.551.836
g.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	8.691.680.897	3.693.390.420	4.998.290.477
h.	Badan Kebijakan Transportasi	589.163.821	192.948.758	396.215.063
i.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	747.514.226	329.875.301	417.638.925
3.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4.744.518.054	2.757.268.382	1.987.249.672
a.	Sekretariat Jenderal	305.854.907	224.132.191	81.722.716
b.	Inspektorat Jenderal	53.700.000	39.122.128	14.577.872
c.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	180.957.336	139.396.280	41.561.056
d.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	601.224.792	165.971.931	435.252.861
e.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	503.180.560	224.688.993	278.491.567
f.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	296.263.131	75.564.996	220.698.135
g.	Ditjen Pembangunan dan	675.709.377	193.270.954	482.438.423

N O	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A - B
	Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
h.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.127.627.951	1.695.120.909	432.507.042
4.	BMKG	3.769.612.696	2.769.700.001	999.912.695
a.	Program Dukungan Manajemen	1.304.068.051	1.230.529.425	73.538.626
b.	Program MKG	2.465.544.645	1.539.170.576	926.374.069
5.	BNPP/ Basarnas	3.600.341.547	2.085.102.085	1.515.239.462
a.	Program Dukungan Manajemen	1.137.405.060	896.365.825	241.039.235
b.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	2.462.936.487	1.188.736.260	1.274.200.227

- b. Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG; dan BNPP/Basarnas sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.
5. Rapat Kerja dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Selasa, 12 September 2023, agenda Penyesuaian RKA K/L TA 2024 Mitra Kerja Komisi V DPR RI sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, memutuskan :
- a. Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2024 Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG; dan BNPP/Basarnas sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	C	A – C
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	190.743.036. 298	146.987.447. 201	147.373.850.0 75	43.369.186.2 23
a.	Sekretariat Jenderal	584.007.802	578.736.341	600.601.864	(16.594.062)
b.	Inspektorat Jenderal	136.400.000	91.232.000	92.932.883	43.467.117
c.	Ditjen Bina Marga	77.722.959.7 95	55.399.768.5 80	55.440.846.01 0	22.282.113.7 85
d.	Ditjen Cipta Karya	32.455.360.0 00	32.704.222.4 29	32.965.330.50 3	(509.970.503)
e.	Ditjen Sumber Daya Air	52.930.280.4 09	47.644.049.9 11	47.686.751.13 5	5.243.529.27 4
f.	Ditjen Perumahan	25.172.229.1 42	9.251.957.24 0	9.256.864.286	15.915.364.8 56
g.	Ditjen Bina Konstruksi	692.054.956	590.514.956	598.560.098	93.494.858
h.	Badan	231.777.669	142.328.583	143.564.190	88.213.479

N O	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHA N TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	PENYESUAI A N NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	C	A – C
	Pengembangan Infrastruktur Wilayah				
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	611.890.525	425.138.972	427.640.327	184.250.198
j.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	206.076.000	159.498.189	160.758.779	45.317.221
2.	Kementerian Perhubungan	74.536.458.5 43	38.477.079.8 86	38.604.826.45 9	35.931.632.0 84
a.	Sekretariat Jenderal	1.243.503.12 4	645.574.148	649.493.173	594.009.951
b.	Inspektorat Jenderal	141.193.093	111.108.529	112.424.822	28.768.271
c.	Ditjen Perhubungan Darat	13.716.423.0 94	6.642.204.66 4	6.664.310.961	7.052.112.13 3
d.	Ditjen Perhubungan Laut	14.775.940.1 97	9.499.464.79 8	9.538.475.833	5.237.464.36 4
e.	Ditjen Perhubungan Udara	19.591.350.7 75	7.673.375.78 8	7.709.626.236	11.881.724.5 39
f.	Ditjen Perkeretaapian	15.039.689.3 16	9.689.137.48 0	9.694.877.472	5.344.811.84 4
g.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	8.691.680.89 7	3.693.390.42 0	3.708.986.611	4.982.694.28 6
h.	Badan Kebijakan Transportasi	589.163.821	192.948.758	196.457.340	392.706.481
i.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	747.514.226	329.875.301	330.174.011	417.340.215
3.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4.744.518.05 4	2.757.268.38 2	2.765.969.080	1.978.548.97 4

N O	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHA N TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	PENYESUAI A N NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	C	A – C
a.	Sekretariat Jenderal	305.854.907	224.132.191	225.487.993	80.366.914
b.	Inspektorat Jenderal	53.700.000	39.122.128	39.696.596	14.003.404
c.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	180.957.336	139.396.280	140.136.382	40.820.954
d.	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	601.224.792	165.971.931	166.992.889	434.231.903
e.	Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	503.180.560	224.688.993	225.612.164	277.568.396
f.	Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	296.263.131	75.564.996	76.482.190	219.780.941
g.	Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	675.709.377	193.270.954	194.521.490	481.187.887
h.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.127.627.95 1	1.695.120.90 9	1.697.039.376	430.588.575
4.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3.769.612.69 6	2.769.700.00 1	2.790.519.777	979.092.919
a.	Program Dukungan Manajemen	1.304.068.05 1	1.230.529.42 5	1.251.349.201	52.718.850

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ UNIT ORGANISASI/ PROGRAM	PAGU KEBUTUHA N TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	PENYESUAI A N NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	C	A – C
b.	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.465.544.64 5	1.539.170.57 6	1.539.170.576	926.374.069
5.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ BASARNAS	3.600.341.54 7	2.085.102.08 5	2.101.373.027	1.498.968.52 0
a.	Program Dukungan Manajemen	1.137.405.06 0	896.365.825	912.636.767	224.768.293
b.	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	2.462.936.48 7	1.188.736.26 0	1.188.736.260	1.274.200.22 7

- b. Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG; dan BNPP/Basarnas sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

1. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Selasa, 29 Agustus 2023, agenda Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA.2022 dan RKA K/L TA. 2024 BMKG dan BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2024, memutuskan :
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BMKG dan BNPP/Basarnas terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.
 - b. Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG dan BNPP/Basarnas terhadap alokasi anggaran masing-masing Badan dalam RAPBN TA 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: S-626/MK.02/2023 dan B.644/M.PPN/D.8/ PP.04.02/ 07/ 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L TA 2024 sebagai berikut:

Dalam

Ribu Rupiah

N O	KEMENTERIAN / LEMBAGA	PAGU KEBUTUHAN	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	(A-B)
1.	BMKG	3.769.612.696	2.769.700.001	999.912.695
2.	BNPP/ Basarnas	3.600.341.547	2.085.102.085	1.515.239.462

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan BMKG dan BNPP/Basarnas akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

- c. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas untuk membuat rincian kegiatan dan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 secara detail dan disampaikan kepada Komisi V DPR RI.
2. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Kamis, 31 Agustus 2023, agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :
 - a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Kerja Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Dalam ribuan
rupiah

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Sekretariat Jenderal	584.007.802	578.736.341	5.271.461
2.	Inspektorat Jenderal	136.400.000	91.232.000	45.168.000
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	611.890.525	425.138.972	186.751.553
4.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	231.777.669	142.328.583	89.449.086

- b. Komisi V DPR RI bersama Setjen, Itjen, BPSDM dan BPIW Kementerian PUPR sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing Unit Kerja Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN TA 2024.
 - c. Komisi V DPR RI meminta Setjen Kementerian PUPR untuk mempercepat sosialisasi terkait dengan pelaksanaan peraturan bidang PUPR, diantaranya UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
3. Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala BPSDM-P, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Kamis, 31 Agustus 2023, agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :
- a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDMP dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

*Dalam ribu
rupiah*

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Sekretariat Jenderal	1.243.503.124	645.574.148	597.928.976
2.	Inspektorat Jenderal	141.193.093	111.108.529	30.084.564
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	8.691.680.897	3.693.390.420	4.998.290.477
4.	Badan Kebijakan Transportasi	589.163.821	192.948.758	396.215.063

- b. Komisi V DPR RI bersama Setjen, Itjen, BPSDMP dan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan sepakat bahwa program dan kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 disesuaikan

dengan saran, pendapat dan usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN TA 2024.

- c. Komisi V DPR RI meminta Itjen Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional bandara dan pelabuhan yang belum berfungsi optimal, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - d. Komisi V DPR RI meminta Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian terhadap tarif angkutan udara, serta melaporkannya kepada Komisi V DPR RI
4. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian menghadirkan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Senin, 4 September 2023, dengan agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :
- a. Komisi V DPR RI bersama Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sepakat untuk menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat terkait alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam RAPBN TA 2024 pada Selasa, 5 September 2023 Pukul 14.00 WIB.
 - b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan usulan, saran dan pendapat Komisi V DPR RI.
5. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala BPTJ menghadirkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kepala BPTD Seluruh Indonesia, Selasa, 5 September 2023, dengan agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan:
- a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Darat, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

*Dalam ribu
rupiah*

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Ditjen Perhubungan Udara	19.591.350.775	7.673.375.788	11.917.974.987
2.	Ditjen Perhubungan Darat	13.716.423.094	6.642.204.664	7.074.218.430
3.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	747.514.226	329.875.301	417.638.925

b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Darat, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan untuk dapat mengakomodir saran, pendapat, serta usulan Komisi V DPR RI dalam menyusun program dan kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024.

6. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian menghadirkan Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Selasa, 5 September 2023, dengan agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :

a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Ditjen Perhubungan Laut	14.775.940.197	9.499.464.798	5.276.475.399
2.	Ditjen Perkeretaapian	15.039.689.316	9.689.137.480	5.350.551.836

b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada

Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran, pendapat, serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN TA 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menghadirkan Kabalai Pelaksanaan Jalan Nasional Seluruh Indonesia Kementerian PUPR, Rabu, 6 September 2023, dengan agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :

a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

*Dalam ribu
rupiah*

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Ditjen Bina Marga	62.085.406.920	55.399.768.580	6.685.638.340
2.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	206.076.000	159.498.189	46.577.811

b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran, pendapat, serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN TA 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kriteria, lokus, serta mekanisme pengusulan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang merujuk atas Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan.

d. Komisi V DPR RI menyetujui usulan Ditjen Bina Marga untuk menambahkan sumber pendanaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam postur anggaran Ditjen Bina Marga TA. 2024.

8. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Dirjen Cipta Karya menghadirkan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi seluruh Indonesia dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah seluruh Indonesia, Rabu, 6 September 2023, dengan agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :

a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

*Dalam ribu
rupiah*

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Ditjen Cipta Karya	32.455.360.000	32.704.222.429	(248.862.429)
2.	Ditjen Bina Konstruksi	692.054.956	590.514.956	101.540.000

b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran, pendapat, serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN TA 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk menambah alokasi anggaran program Padat Karya TA 2024.

9. Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perumahan dan Dirjen Sumber Daya Air menghadirkan Kabalai Pelaksana Penyediaan Perumahan Seluruh Indonesia dan Kabalai Wilayah Sungai Seluruh Indonesia Kementerian PUPR, Kamis, 7 September 2023, dengan agenda Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024, memutuskan :

a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-

masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

*Dalam ribu
rupiah*

NO	UNIT ORGANISASI ESELON I	PAGU KEBUTUHAN TA 2024	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024	SELISIH
		A	B	A-B
1.	Ditjen Sumber Daya Air	52.930.280.409	47.644.049.911	5.286.230.498
2.	Ditjen Perumahan	25.172.229.142	9.251.957.240	15.920.271.902

- b. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan masing-masing Unit Organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan saran, pendapat, serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN TA 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka menambah alokasi pada Program Padat Karya TA 2024 (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) serta program Rumah Susun minimal sama dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya.

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Profesi Arsitek Dan Dewan Arsitek Indonesia, Selasa, 19 September 2023, dengan agenda terkait membahas permasalahan terkait profesi arsitek di Indonesia.

KUNJUNGAN KERJA

1. Kunjungan Kerja Spesifik

- a. Tanggal 8 – 10 September 2023 melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke :
 - Provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang, meninjau Exit tol Prabumulih dan Embung serta Rusunawa Universitas Sriwijaya;
 - Provinsi Jawa Timur, Kota Batu, meninjau stasiun klimatologi;
 - Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, meninjau Pembangunan Pasar Negara.
- b. Tanggal 14 – 16 September 2023 melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke :
 - Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, meninjau SPAM Regional Jatiluhur;

- Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, meninjau kegiatan penggantian jembatan Cikereteg, Ciawi;
 - Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, meninjau rencana KSPN Dieng.
- c. Tanggal 26 – 28 September 2023, melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Perhubungan ke :
- Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan meninjau Terminal Amplas;
 - Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, meninjau Pelabuhan Trisakti;

2. Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke :

- a. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Kota Kupang tanggal 4 – 8 Oktober 2023
- b. Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali tanggal 4 – 8 Oktober 2023
- c. Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 11 – 15 Oktober 2023

Jakarta, Oktober 2023
Kabagset komisi V DPR RI,

Nunik Prihatin Budiastuti, SH.
NIP. 19691202 199803 2 002